

REVITALISASI IPS DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

**Oleh:
Miftahuddin ***

Abstraks.

Artikel ini membahas tentang pentingnya revitalisasi IPS dalam perspektif global. Pembaruan kurikulum yang signifikan sebagai jawaban atas Perubahan masyarakat yang begitu cepat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa akibat positif dan sekaligus akibat negatif bagi kehidupan. Hingga kini, peran lembaga pendidikan masih tetap menjadi tumpuan harapan yang dapat membawa pencerahan bagi masyarakat yang mengalami perubahan. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa lembaga pendidikan selalu tertinggal oleh kemajuan yang dicapai masyarakat. Akibatnya lembaga pendidikan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap semua perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Tujuan pendidikan IPS adalah mensinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan peserta didik. Oleh karena itu maka dalam mata pelajaran IPS terdiri dari berbagai ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu sosial itu harus direvitalisasi sedemikian rupa agar mudah dipelajari atau difahami oleh siswa sesuai dengan tingkat perkembangan psikologisnya di sekolah dengan cara menyajikan topik atau tema pelajaran dengan isu-isu yang menarik seperti Hormat pada Guru, Perilaku Nyontek dan Akibatnya, Masalah Narkoba, Tawuran Antar Pelajar, Disiplin. Korupsi, Kualitas Generasi Muda, Penggunaan Internet, Disiplin dan Etos Kerja, Memelihara Budaya Lokal, Permasalahan Urbanisasi, Sektor Informal. UKM dan Globalisasi Trafficking, Global Warning,

* IAIT Kediri

Pelestarian Lingkungan Hidup Kepedulian Sosial,
Bencana Alam, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Revitalisasi IPS, Perspektif Global,*

Pendahuluan

Seringkali orang mempertanyakan mengapa kurikulum sering berubah-ubah, demikian pula kurikulum IPS ? Secara teori, perubahan kurikulum adalah suatu yang tidak terhindarkan, lebih-lebih kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Dalam konteks ilmu sosial, ada dalil yang menyatakan bahwa “*All is change*”. Di samping ada pula hal-hal yang menunjukkan suatu kontinuitas. Dengan kata lain, bahwa dalam ilmu sosial tidak ada yang tetap karena yang tetap adalah perubahan¹. Barangkali sangat tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat dunia saat ini (tidak terkecuali Indonesia) yang sedang mengalami perubahan yang begitu cepat. Karena itu masyarakat saat ini adalah masyarakat produk perubahan, bagian dari sunatullah atau hukum alam.

Perubahan masyarakat yang begitu cepat sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa akibat positif dan sekaligus akibat negatif bagi kehidupan. Hingga kini, peran lembaga pendidikan masih tetap menjadi tumpuan harapan yang dapat membawa pencerahan bagi masyarakat yang mengalami perubahan. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa lembaga pendidikan selalu tertinggal oleh kemajuan yang dicapai masyarakat. Akibatnya lembaga pendidikan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap semua perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk mengantisipasi dan sekaligus menjawab berbagai tantangan akibat perubahan itu, civitas akademika sesuai dengan

¹ Sapriya, Pendidikan IPS, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h. 1

bidang dan dukungan community of scholar-nya masing-masing sudah seharusnya melakukan berbagai upaya penyesuaian, bahkan perubahan di bidangnya masing-masing. Hal ini sangat tepat dilakukan di Indonesia mengingat Negara dan bangsa kita saat ini tengah mengalami perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akibat dari krisis kehidupan yang berkepanjangan.

Dalam bidang pendidikan IPS, baik yang bersifat school based maupun community based tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana, bahkan semakin besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun ke belakang. Tantangan mendesak yang perlu dijawab adalah terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu variable yang punya kontribusi cukup besar terhadap baik buruknya kualitas pendidikan adalah unsur guru atau pendidik.

Lima faktor pendidikan yang disampaikan oleh Amir Dain menyebutkan, yaitu :

1. Pendidik
2. Peserta didik
3. Alat pendidikan
4. Tujuan pendidikan
5. Biaya pendidikan²

Dari lima faktor pendidikan tersebut salah satunya adalah guru. Dan guru ini merupakan faktor yang sangat penting, karena kegiatan proses belajar mengajar bisa terjadi dengan baik dalam arti siswa semangat belajar, alat pendidikan dapat digunakan dengan maksimal, tujuan belajar bisa tercapai dengan maksimal dan bahkan biaya pendidikan bisa efektif dan efisien semuanya itu tergantung dari kemampuan dan ketrampilan seorang guru. Jadi guru merupakan ujung tombak dari pada proses pendidikan.

² Amir Dain Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, Bandung : Rosda Karya, 1988

Pengertian IPS

IPS adalah terjemahan dari Sosial Studies yang ada di Amerika yang berarti “penelaahan atau kajian tentang masyarakat”.³

Beberapa pengertian tentang sosial studies yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh beberapa tokoh pendidikan terkenal :

1. Edgar B Wesley, yaitu : Social stuiies are thr social sciences simplited for paedagogial purposes in school. The sosial studies consist og geography history, economic, sociology, civics and various combination of these subjects.
2. John Jarolimek mengemukakan : The social studies as a part of elementary school curriculum draw subject-matter content from the social science, history, sociology, political science, social psychology, philosophy, anthropology, and economic. The social studies have been defined as “those portion of the social science ... selected for instructional purposes”

Pengembangan IPS di Indonesia banyak mengambil ide-ide dasar dari pendapat-pendapat yang dikembangkan di Amerika Serikat tersebut dengan tujuan, materi dan penanganannya dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan pada realitas, gejala dan problem sosial yang menjadi kajian IPS yang tidak sama dengan negara-negara lain.

Berikut ini pengertian IPS menurut ahli pendidikan dan ahli IPS di Indonesia :

1. Moeljono Cokrodikardjo : IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu

³ Lapis PGMI, Ilmu Pengetahuan Sosial 1, 2009, h. 10.

politik dan ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari.

2. Nu'man soemantri menyatakan : IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan mengandung arti :
 - a. menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir siswa-siswi sekolah dasar dan lanjutan.
 - b. Mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna.
 - c. Tim IKIP Surabaya mengemukakan : IPS merupakan bidang studi yang menghormati, mempelajari, megolah, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah human relationship hingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah-sekolah.

Dengan demikian IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Dalam mengkaji masyarakat guru dapat melakukan kajian dari berbagai sudut pandang sosial, seperti melalui kajian

pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-pemeintahan dan aspek sosial yang disederhanan untuk mencapai tujuan pembelajaran⁴.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi-definisi tersebut IPS adalah studi sosial yang mengangkat konsep-konsep, teori-teori ilmu sosial secara terintegrasi una memahami, mempelajari, memikirkan pemecahan masalah-masalah yan ada di masyarakat, sehingga member kepuasan bagi personal dan bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan mendidik anak menjadi warga Negara yang baik

Bahan ajar IPS dipilih dari bahan-bahan ilmu-ilmu sosial, disajikan kepada siswa dengan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya menjadi tugas kita bagaimana memilih bahan, bagaimana mengorganisasikan, dan bagaimana menyajikannya secara ilmiah dan psikologis agar dapat mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan Pengajaran IPS

Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosikultural, psikologis, ekonomi dan politis. Pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau karakter bangsa yang berkepribadian nasional.

Seperti diuraikan di atas untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan seputar kehidupan sosial budaya, pendidikan IPS yang bertujuan akhir pada pembangunan bangsa dan negara Indonesia yaitu masyarakat adil makmur harus berlandaskan :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. UU Sidiknas No.2 tahun 1999 pasal 1 ayat (2).

Tujuan pengajaran IPS mendidik siswa menjadi warga negara yang baik, berperilaku sopan, hormat pada guru, orang tua, percaya diri, kerja mandiri, tidak nyontek,

⁴ Ibid, h. 10

jujur, disiplin, bertanggung jawab, tidak takut UN, membatasi korupsi sejak dini dari akar-akarnya, membangkitkan Indonesia dari segala keterpurukan, menjadi generasi muda yang mampu memecahkan masalah, tidak menambah masalah dan tidak menjadi beban masyarakat.⁵

Tentang tujuan IPS juga disebutkan secara lebih rinci lagi sebagai berikut :

1. Menyiapkan siswa menjadi warga Negara yang baik
2. Menyiapkan siswa memiliki kemampuan berpikir, membentuk inquiry skills, mengembangkan sikap nilai.
3. Membantu anak dapat berpikir logis, mengembangkan rasa toleransi
4. Membantu anak agar dapat mengemukakan ide-ide secara selektif, secara lisan dan tertulis.
5. Membantu anak mengerti dunia hidupnya tidak mengawan-awang, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
6. Mengembangkan rasa estetika, etika, menghormati orang lain, memanfaatkan waktu senggang dan sebagainya.⁶

Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia.

Keberadaan Pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embriodik kurikulum, Pendidikan IPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat mata pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum tahun 1964, dan kurikulum 1968, baru dalam kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum tahun 1994, Pendidikan IPS telah menjadi

⁵ Buchari Alma, Pembelajaran Studi Sosial, Alfa Beta : Bandung, 2010, h 18.

⁶ Ibid, h. 18.

salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang /Standar Nasional Pendidikan, maka tidak ada lagi kurikulum yang bersifat terpusat (kurikulum nasional). Menurut PP tersebut, penyusunan kurikulum menjadi kewenangan satuan pendidikan.

Oleh karena itu, kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemerintah Pusat yang menugaskan kepada Badan menyusun standar nasional termasuk dalam membuat Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mulai tahun 2006 diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi (SI) dan Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).⁷

1. Kurikulum Pendidikan IPS pada tahun 1945-1964

Pada kurun waktu tahun 1945-1964 istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi social studies menurut Edgar Wesley yang menyatakan ” Sosial studies are the sosial sciences simplified for pedagogical purposes” (Pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan). Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, civics, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah.

2. Kurikulum Pendidikan IPS pada tahu 1964 dan 1968

⁷ Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Bandung : Nuansa Aulia, h. 101

Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. "Dimiyati menamakan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial". Dalam kurikulum tersebut, ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan civics. Pada tahun 1968, terjado perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kesarganegaraan yang merupakan koreksi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan.

Ketika kurikulum 1964 masih berlaku, istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) mulai muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawang Mangu Solo. Menurut Winataputra dalam Laporan Seminar tersebut ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-maslah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-maslah sosial itu dapat dipahami siswa.

Winataputra : IPS sebagai mata pelajaran pertama kali masuk dalam dunia persekolahan terjadi pada tahu 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Pada saat itu mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, maupun SMA. Menurut Winataputra, dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah

”Pendidikan Kewargaan Negara atau Studi Sosial” sebagai mata pelajaran terpadu. Dalam Kurikulum SD PPSP tersebut, IPS diuraikan sama dengan Pendidikan kewargaa negara.

3. Kurikulum IPS tahun 1975 dan 1984

Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (disingkat IPS) dalam sistem kurikulum di Indonesia. IPS sebagai mata pelajaran baru dalam Kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada di tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran (Content Based Curriculum). Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Winataputra, Kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dan empat profil sebagai berikut : (1) pendidikan Moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi ”citizenship tranmision”, (2) pendidikan IPS terpadu (integrated) untuk Sekolah Dasar, (3) pendidikan IPS terkompfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi, dan (4) pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Dalam Kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing

mata pelajaran atau bahkan pembahasan secara terpisah. Pada hakekatnya, model kurikulum 1984 untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Demikian pula untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan, artinya kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1975.

4. Kurikulum IPS pada tahun 1994

Pada Kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedudukan PPKn ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang (SD, SMP, SMA). Untuk mata pelajaran IPS, Kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut : (i) mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu (*integrated*) dan berlaku untuk kelas III s/d kelas VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, (2) mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan artinya masih bersifat terkonfederasi (*correlated*) yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (3) mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah (*separated*) atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum untuk kelas I dan II; ekonomi dan geografi untuk kelas I dan II; sosiologi kelas II; Sejarah Budaya untuk kelas III

program bahasa; ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas III Program IPS.

Khusus untuk IPS SD, materi pelajaran dibagi atas dua bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Materi pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi, dan politik/pemerintahan sedangkan cakupan materi sejarah meliputi sejarah lokal dan sejarah nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan ketrampilan dasar yang akan digunakan dalam kehidupannya serta meningkatkan rasa nasionalisme dari peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para siswa memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Karena IPS untuk SMP dan SMA menganut pendekatan konfederasi dan terpisah-pisah maka tujuannya disesuaikan dengan karakteristik tiap mata pelajaran yang terpisah-pisah. Tujuan mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk SMA, misalnya adalah "menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia.

Mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan obyektif. Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial

budaya sesuai dengan kedudukan, peraaaan, norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Mata pelajaran geografi bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Adapun mata pelajaran Tatanegara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan anegara, tata peradilan, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun negara lain.

5. Kurikulum IPS dalam Permendiknas

Memasuk abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indoensia. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam yakni melalui perubahan dengan diberlakukannya Kurikulum Suplemen ternyata dorsakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengadakan barbagai uji coba model kurikulum. Pada saat itu pula digulirkan gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sempat mendapat tanggapan pro dan kontra tetapi nama KBK menjadi sangat populer karena gemanya bukannya terjadi di jenjang sekolah melainkan hingga ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan bahkan tingkat perguruan tinggi.

Pada tahun2003 disahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut

adalah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 35 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya standar nasional pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendahnya.

Sementara itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi :

- a. standar isi
- b. standar proses
- c. standar kompetensi lulusan
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. standar sarana dan prsarana
- f. standar pengelolaan
- g. standar pembiayaan
- h. standar penilaian pendidikan.

Dalam Pasal 37 UU Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian penjelasan Undang Undang Sisdiknas Pasal 37 bahwa bahan kajian Ilmu Pengetahuan Sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan IPS sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menjadikan kedudukan IPS

semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus menjawab berbagai keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami oleh para akademisi dan praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan pada saat sebelum lahirnya undang-undang.

Peranan dan Strategis Pembelajaran IPS di Sekolah/Madrasah

Ilmu Pengetahuan Sosial yang merupakan sebuah mata pelajaran yang materinya terdiri dari gabungan (fusi) dari berbagai macam Ilmu Sosial akan memberikan sumbangan yang nyata dalam membentuk pribadi siswa, atau sekurang-kurangnya dapat membentuk landasan yang berarti untuk bekal siswa di kemudian hari setelah mereka terjun di masyarakat.

Dalam mempelajari IPS diharapkan siswa tidak hanya menguasai segi pengetahuannya saja. Tetapi juga diharapkan mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Oleh karena itu, pelajaran IPS diharapkan dapat membentuk pribadi siswa, mendewasakan jiwanya, dan mereka tidak canggung dalam pergaulan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Buchari Alma sebagai berikut : Manusia adalah mahluk sosial artinya ia harus dapat menjadi anggota beberapa kelompok sekaligus dan tidak bisa dipisahkan dari lingkunganhidup sekitar.⁸

Dalam mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya sudah tentu harus ditinjau dari berbagai sudut disiplin ilmu. Mengenai proses dan masa lampau kita menggunakan sejarah, mengenai kekuasaan, hak dan kewajiban kita menggunakan ilmu politik, mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya menggunakan tinjauan geografi, mengenai masalah pemenuhan kebutuhan, lapangan kerja berhubungan dengan ilmu ekonomi dan sebagainya.

⁸Ibid, h.22

Revitalisasi Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Perspektif Global

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tersebut di atas sebaiknya di sekolah diberikan mata pelajaran yang IPS yang merupakan adopsi dari Amerika, yaitu Sosial Studies (Studi Sosial). Kemudian juga diberikan rambu-rambu masalah hangat yang muncul di masyarakat, baik berdasarkan problematic, topic, tematis dan sebagainya. Serta dilengkapi dengan metode penyampaian yang tepat, dengan berbagai metode ceramah, diskusi kelompok, problem solving, inquiry, disertai bahan documenter menggunakan teknologi pendidikan yang menarik. Rambu-rambu tersebut disampaikan kepada guru IPS (studi sosial), yang kelak akan dibahas bersama dengan para siswa dalam setiap kali pertemuan dalam pelajaran studi sosial tersebut.

Tujuan IPS adalah menjadikan siswa menjadi warga negara yang baik, yaitu masyarakat yang mapan, kritis, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya, mengingat banyak sekali permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sangat kompleks sekali yang terjadi dalam masyarakat, yang harus dipecahkan dengan memandangnya dari berbagai sudut disiplin ilmu, dalam satu kerangka Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Untuk mencapai tujuan dan kompleksitas kehidupan dimasyarakat, maka dalam pembelajaran sosial perlu diadakan revitalisasi dengan menggunakan pendekatan dan metode, konsep, topik, tema, problem, isu kontemporer, spiral expoding, broodfeld, metode ceramah, diskusi, problem solving, inquiry dan sebagainya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa IPS adalah sebuah mata pelajaran dalam kurikulum Pendidikan di Indonesia yang wajib diikuti oleh semua siswa di sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA.

Tujuan pendidikan IPS adalah mensinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan peserta didik. Oleh karena itu maka dalam mata pelajaran IPS terdiri dari berbagai ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu sosial itu harus direvitalisasi sedemikian rupa agar mudah dipelajari atau difahami oleh siswa sesuai dengan tingkat perkembangan psikologisnya di sekolah dengan cara menyajikan topik atau tema pelajaran dengan isu-isu yang menarik seperti Hormat pada Guru, Perilaku Nyontek dan Akibatnya, Masalah Narkoba, Tawuran Antar Pelajar, Disiplin, Korupsi, Kualitas Generasi Muda, Penggunaan Internet, Disiplin dan Etos Kerja, Memelihara Budaya Lokal, Permasalahan Urbanisasi, Sektor Informal, UKM dan Globalisasi Trafficking, Global Warning, Pelestarian Lingkungan Hidup Kepedulian Sosial, Bencana Alam, dan lain sebagainya.



Daftar Pustaka

- Sapriya, *Pendidikan IPS*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Amir Dain Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 1988
- Lapis PGMI, *Ilmu Pengetahun Sosial 1*, 2009,
- Buchari Alma, *Pembelajaran Studi Sosial*, Bandung: Alfa Beta, 2010
- Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Bandung : Nuansa Aulia,

